

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA TIBUBENENG KUTA UTARA**

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Humaniora
(Universitas Dhyana Pura)
sripurnama@undhirabali.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine, describe, and analyze the role of BUMDes Gentha Persada in order to improve welfare, as well as to find out, describe, and analyze the supporting and inhibiting factors of BUMDes Gentha Persada in order to improve the welfare of the people of Tibubeneng village. This research uses descriptive research with a qualitative approach and is limited by two research focuses, namely (1) Role of BUMDes Gentha Persada in the Framework of Improving the Welfare of the People of Tibebeneng Village (2) Supporting and Inhibiting Factors of Gentha Persada's BUMDes in the Framework of Increasing the Welfare of the People of Tibubeneng Village. The results showed that the role of BUMDes Gentha Persada in improving the welfare of the community through business units managed under BUMDes and opening up employment opportunities for the community. The supporting factors of BUMDes to improve community welfare are the potential for the development of the Tibubeneng Village in the economic sector because it is located in the North Kuta area which has good tourism development potential and supporting human resources while inhibiting factors such as BUMDes have not maximally provided BUMDes program socialization. in the community, not yet maximized in business and economic development, the community still thinks in the scope of the banjar so that it is not yet optimal in supporting the BUMDes program, it requires the support of all elements of society both customary and official, potential human resources owned by villages prefer to work in other agencies.

Keywords: BUMDes, Welfare, PAD, Economy counting Knowledge, Interest in Entrepreneurship.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Menurut Ramadhana, et al (2013),

keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Pembangunan desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan.

Desa Tibubeneng sebagai salah satu desa yang mulai berkembang khususnya di bidang pariwisata. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa, desa Tibubeneng membentuk BUMDes Tahun 2017. BUMDes Gentha Persada telah telah membuka usaha-usaha atau mengembangkan usahanya untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat dipedesaan supaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Tahun 2018 BUMDes Gentha Persada memperoleh dana dari Desa Tibubeneng sebesar

Rp. 430.000.000 untuk dikelola dalam beberapa unit usaha seperti Simpan Pinjam, jasa Sampah, Perdagangan barang dan jasa, *Money Charger*.

Berikut data tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Tibubeneng dari tahun 2015-2018:

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Tibubeneng Tahun 2015-2018

Tingkat Kesejahteraan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah keluarga prasejahtera	0	0	0	0
Jumlah keluarga Sejahtera 1	47	55	47	55
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	0	103	111	125
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	1673	1673	1673	1681
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	741	741	740	741
Total jumlah kepala keluarga	2461	2572	2571	2602

Sumber: Profil Desa Tibubeneng, 2019

Berdasarkan data diatas dapat terlihat tingkat kesejahteraan keluarga di desa Tibubeneng masih belum merata dari tahun 2015-2018. Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat, tapi dari data yang belum sepenuhnya kesejahteraan masyarakat meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana peran BUMDes Gentha Persada terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubebeng?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes Gentha Persada dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tibubeneng?

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2013). Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Kesejahteraan Perorangan
Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.
- b. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desayang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, 2016).

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "good-will" dalam merespon pendirian BUMDes (Dewi, 2014). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembagaekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar daribudaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdesg. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meski-

pun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDesdapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersamaoleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan olehpemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersamasebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Kamaroesid, 2016 empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjaditulangpunggunggrowth dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakanperwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya seriusuntuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalank-anoleh BUMDES.

2.2.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Organisasi

Pengelola BUMDES hendaklah dilakuk-kan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalinkan kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.2.4 Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

2.1.6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

- 1) Observasi
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat Peran dan Kontribusi BUMDes secara *real* serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa Tibubeneng dengan adanya pengelolaan BUMDes disana.
- 2) Wawancara
Wawancara/interview adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah masyarakat Desa Tibubeneng maupun pengurus BUMDes Gentha Persada.
- 3) Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis dari sumber utama data. Dokumen dalam penelitian ini buletin, peraturan-peraturan, dan sebagainya

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah: kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan kepentingan masyarakat supaya kebutuhan ekonomi terpenuhi, adanya kesatuan sosial, memberikan keamanan dan keselamatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tibubeneng.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena peneliti dapat menggambarkan dan menafsirkan data yang menjadi bahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yaitu BUMDes Genta Persada Desa Tibubeneng. Dengan penelitian deskriptif ini akan didapatkan gambaran secara terarah dan sistematis, faktual dan akurat tentang faktor-faktor, sifat dan gejala yang diamati, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terealisasi. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melakukan keadaan subjek/obyek (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.4 Metode Analisis Data

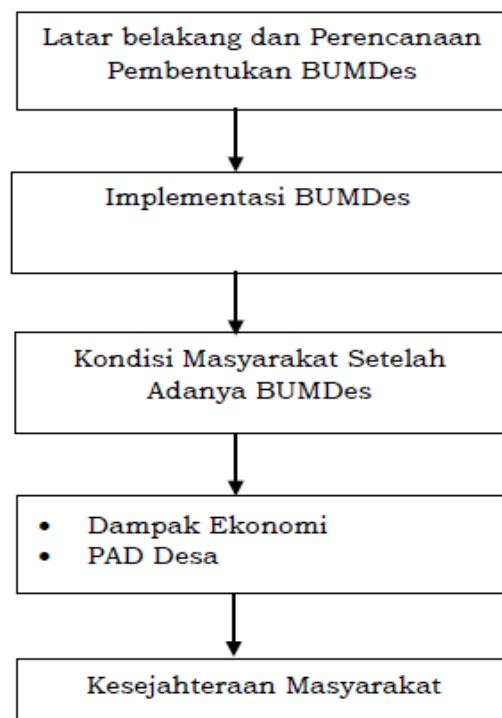
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya yang sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun teknis analisis data yang digunakan yaitu triangulasi. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2013). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Moloeng (2012), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan tehnik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2009). Adapun untuk menempuh kepercayaan itu, maka ditempuh kepercayaan sebagai berikut :1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.5 Rancangan penelitian

Rancangan Penelitian Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagai berikut:



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tibubeneng merupakan salah satu desa yang berkembang di bidang Pariwisata dan sudah memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Genta Persada. BUMDes Genta Persada diresmikan pada tanggal 22 Maret 2017 oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dengan dua unit usaha Simpan Pinjam dan jasa Sampah. Pendirian dan Pengelolaan didasarkan pada Peraturan Desa Tibubeneng 04 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sesuai dengan AD/ART dan perundangan undangan, tujuan pendirian BUMDes Genta Persada adalah sebagai upaya menampung kegiatan perekonomian di desa Tibubeneng dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2018, melihat respon masyarakat yang positif,

maka BUMDes Genta Persada menambah dua unit usaha lagi yaitu *Money Charger* dan perdagangan.

Perencanaan dan pembentukan BUMDes Genta Persada ini adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karena melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa Tibubeneng. Pendirian BUMDes Genta Persada di Desa Tibubeneng akan menimbulkan suatu dampak. Dampak kebijakan publik merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2005) yaitu menggunakan *single program before after*. Berikut Tabel perkembangan hasil pembangunan sebelum dan sesudah adanya BUMDes Genta Persada di desa Tibubeneng.

Tabel 2. Perkembangan Hasil Pembangunan Desa Tibubeneng.

No	Sasaran dan Objek	Tingkat Perkembangan		Keterangan
		Tahun 2016 Kondisi Sebelum ada BUMDes	Tahun 2018 Kondisi Setelah ada BUMDes	
1	Pendapatan Asli Daerah	0	Rp45.000.000	Tahun 2018 PAD hanya berasal dari BUMDes
2	Pendapatan Riil Rata Rata Kepala Keluarga	Rp1.500.000	Rp2.500.000	Kenaikan pendapatan riil keluarga
3	Prasarana air Bersih dan Sanitasi	Seluruh masyarakat tercukupi dengan air bersih	Seluruh masyarakat tercukupi dengan air bersih	Kesehatan masyarakat terjamin
4	Prasarana Transportasi	Jalan umum tidak ada yang rusak dan teraspal	Jalan umum tidak ada yang rusak dan teraspal	Pembangunan berjalan dengan baik

Sumber: Profil Desa Tibubeneng, 2019

Berdasarkan Tabel 2 diatas Pendapatan Asli Desa sebelum adanya BUMDes didapatkan dari sumbangan masyarakat dan setelah adanya BUMDes, Pendapatan Asli desa Tibubeneng didapatkan dari pembagian prosentase keuntungan BUMDes. Berdasarkan AD/ART BUMdes, pembagian keuntun-

gan desa sebesar 30 persen dari laba yang diperoleh oleh BUMDes. Pendapatan desa dari BUMDes belum maksimal karena pendapatan dari BUMDes dari unit usaha belum memperoleh keuntungan secara maksimal. Sedangkan dari sisi kesehatan dan Pembangunan di desa Tibubeneng, BUMDes tidak

memberikan peran maksimal karena sudah dibiayai dari Dana Desa.

4.1 Peranan BUMDes bagi Masyarakat

Sesuai tujuan didirikannya BUMDes, yaitu menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat agar usaha masyarakat lebih produktif dan efektif maka BUMDes Gentha Persada memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui :

1. Peran Ekonomi

BUMDes Gentha Persada memberikan peran ekonomi dengan menjalankan beberapa unit usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1). Unit Usaha BUMDes Gentha Persada. Adapun unit usaha yang dikelola oleh BUMDes yaitu :

a. Usaha Simpan Pinjam

Usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDes Gentha Persada. Unit usaha ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimpan maupun memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Pinjaman dana yang disalurkan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, perternakan, maupun usaha jasa. Dari hasil wawancara dengan salah seorang salah satu peminjam modal bernama Wayan Suryanto menerangkan bahwa hasil dari peminjaman modal tersebut telah mampu membantu mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatannya, seperti yang diterangkan sebagai berikut:

“Saya memiliki usaha *laundry* ini dari sebelum adanya BUMDes, dan tahun 2018 saya ingin mengembangkan usaha saya, dan saya mengajukan pinjaman untuk usaha saya ke BUMDes dan setelah saya mengembangkan usaha saya pendapatan saya mengalami peningkatan”.

Dengan adanya usaha Simpan pinjam pada BUMDes Gentha Persada ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peminjaman mod-

al di BUMDes Gentha Persada ini dipertukarkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha.

b. Usaha Jasa Sampah

BUMDes Gentha Persada menyediakan unit jasa sampah untuk mengangkut sampah, selain membuat lingkungan bersih dari sampah, Unit jasa sampah menambah pendapatan melalui retribusi. Salah seorang warga bernama Luh Rentadi yang menggunakan jasa sampah BUMdes mengatakan bahwa:

“Semenjak saya menggunakan jasa sampah BUMDes, saya tidak kebingungan untuk mencari tempat pembuangan sampah dan rumah tidak bau karna adanya tumpukan sampah”.

c. *Money Charger*

Usaha *money charger* mulai beroperasi tanggal 3 April 2018 untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di desa Tibubeneng dan memfasilitasi wisatawan mancanegara. Ketua BUMDes Gentha Persada dalam wawancara mengatakan bahwa:

“BUMDes melakukan sinergisitas dengan pengusaha lokal yang bergerak di bidang yang sama dan untuk meningkatkan pemasaran dilakukan secara door to door”.

Dengan usaha ini diharapkan kesejahteraan masyarakat yang ikut bekerjasama dengan *money charger* akan meningkat dan juga mampu memajukan pariwisata di desa Tibubeneng.

d. Perdagangan

Unit usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDes Gentha Persada merupakan perdagangan yang memasarkan produk dari masyarakat desa Tibubeneng ke skala yang lebih luas. BUMDes merupakan perantara yang menghubungkan komoditas produk masyarakat ke pasar sehingga jangkauan penjualan produk memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Ibu Evelin salah seorang pedagang nasi yang bekerjasama dengan BUMDes mengatakan bahwa:

“Penjualan nasi kotak yang saya rintis mengalami peningkatan penjualan karena banyak orderan melalui BUMDes”.

- 2). Membuka Lapangan Pekerjaan BUMDes juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan BUMDes dengan acuan perencanaan kebutuhan karyawan. Seluruh pegawai BUMDes adalah masyarakat Tibubeneng dengan jumlah 20 orang saja tetapi BUMDes sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Tibubeneng dengan memberikan lapangan pekerjaan, seperti keterangan salah seorang pegawai BUMDes I Gde Yuda Sukerta Yasa bagian valuta asing yang dijelaskannya sebagai berikut:
- “Saya merupakan masyarakat desa Tibubeneng yang sudah hampir 1 tahun bekerja di BUMDes saya merasa terbantu dengan adanya BUMDES, karna saya bisa bekerja di BUMDes ini”.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.

Selain kepada masyarakat, BUMDes Genthha Persada berperan untuk meningkatkan PAD Desa Tibubeneng. Seperti keterangan Kepala Desa Tibubeneng I Made Kama-jaya, SE menjelaskan bahwa:

“Prosentase pembagian keuntungan BUMDes berdasarkan AD/ART yaitu 30% untuk desa, 20 % untuk cadangan modal, 10% untuk Dana Pendidikan, 10% untuk Dana Sosial, 5% untuk Jasa Penasehat, 5% untuk Jasa Pengawas, 10% untuk Pengelola dan 10% untuk Pemberdayaan Masyarakat. Namun tahun 2017 BUMDes belum memberikan pembagian keuntungan kepada Desa karna laporan keuangan, BUMDes Genthha Persada mengalami masih mengalami kerugian sedangkan di tahun 2018 BUMDes menyetorkan Rp 45.000.000 juta dari prosentase laba yang diperoleh”.

Pembagian keuntungan ini masih bisa ditingkatkan jika semua unit usaha bisa menghasilkan keuntungan.

Dari keterangan-keterangan diatas BUMDes memberikan peran yang cukup baik, hanya saja ini belum maksimal seperti masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit simpan pinjam di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat saja, tidak hanya itu peran BUMDes dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Tibubeneng dirasa masih belum maksimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam setiap kegiatan BUMDes Genthha Persada. Hal tersebut diperkuat dengan adanya wawancara yang dilakukan terhadap salah satu masyarakat di desa Tibubeneng bernama Ibu Christine yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa saja yang dikelola oleh BUMDes, karena tidak pernah ada sosialisasi di masyarakat. Sehingga saya belum mendapat manfaat dari keberadaan BUMDes di desa Tibubeneng”.

Selain itu melalui wawancara dengan Ketua BUMDes Genthha Persada Bapak I Made Dwijantara, SE menjelaskan sebagai berikut:

“BUMDes Genthha Persada memiliki prospek yang sangat baik karena Desa Tibubeneng memiliki aset yang bisa dikelola baik dari sumber daya alam karena berada di daerah pariwisata dan juga sumber daya manusia yang rata rata berpendidikan tinggi. Namun pengelolaannya belum maksimal seperti dalam pengembangan bisnis dan ekonomi, masyarakat masih berpikir dalam lingkup banjar sehingga belum maksimal dalam mendukung program BUMDes, BUMDes memerlukan dukungan seluruh unsur masyarakat baik adat maupun dinas, dan sumber daya manusia potensial yang dimiliki desa lebih memilih bekerja di instansi lain”.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pembahasan tentang Peranan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Tibubeneng, maka beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BUMDES Genthha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, *money charger*, dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu BUMDes Genthha Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.

2. Faktor Pendukung BUMDes Gentha Persada dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tibubeneng yaitu potensi berkembangnya Desa Tibubeneng di sektor ekonomi cukup tinggi karena terletak di daerah Kuta Utara yang memiliki potensi perkembangan pariwisata yang cukup baik dan sumber daya manusia yang mendukung sedangkan faktor penghambat diantaranya BUMDes belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program program BUMDes kepada masyarakat, belum maksimal dalam pengembangan bisnis dan ekonomi, masyarakat masih berpikir dalam lingkup banjar sehingga belum maksimal dalam mendukung program BUMDes, memerlukan dukungan seluruh unsur masyarakat baik adat maupun dinas, sumber daya manusia potensial yang dimiliki desa lebih memilih bekerja di instansi lain.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya meneliti peran BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari dampak ekonomi dan peningkatan pendapatan asli desa. Peran BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan dari sisi peningkatan kesehatan dan pembangunan masih belum diteliti.

5.3 Saran

Saran dalam penelitian ini bagi BUMDes Gentha Persada yaitu perlu adanya sosialisasi program BUMDes bagi masyarakat secara intensif, bekerjasama dengan kelian dinas dan kelian adat di masing masing banjar.

DAFTAR RUJUKAN

- Moleong, J. Lexi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Patton, Michael Quinn. Terj (Budi Puspo Priyadi). 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Desa Tibubeneng 04 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Ramadhana. Coristya Berlian. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis kebijakan Publik "Konsep Teori dan Aplikasi"*. Jogjakarta.Pustaka Belajar
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah